

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Resource Based Theory*

Resource Based Theory (RBT) dipelopori oleh Penrose (1959), beliau mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan (Simarmata, 2015). Pemikiran tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam (Simarmata, 2015)

Resource Based Theory (RBT) menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul. Menurut Lev (1987) dalam Ningrum (2012), *resource based theory* berpendapat bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset pentingnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja yang optimal.

2. Teori Stakeholder

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Maka *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya (Chairil, 2007 dalam Pawestri 2016). Dengan kata lain perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi juga harus mementingkan para *stakeholder* agar mendapat dukungan tersebut dan dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam kinerjanya. Oleh karena itu, semakin baik pengungkapan *corporate social responsibility* maka *stakeholder* juga akan semakin memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai laba (wibisono, 2007).

3. Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang timbul akibat adanya hubungan antara pemilik (*stakeholder*) dengan pengelola (manajer) suatu organisasi. Perbedaan peran diantara keduanya menyebabkan *asimetri* informasi. Dari *asimetri* informasi tersebut, satu belah pihak (manajer) dapat mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri yang dapat merugikan pihak lainnya (*stakeholder*) (Andreawan, 2013).

Brigham & Houston (2004) dalam Gantino (2016) menjelaskan hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai *principal* membayar/memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai *agen*, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada

agen tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (agen).

4. *Intelektual Capital*

Menurut Stewart dalam Ningrum (2012) mendefinisikan “*intellectual capital as the intellectual material that has been formalized, captured and leveraged to create wealth by producing a higher value assets*”. Stewart berpendapat bahwa *intellectual capital* digunakan untuk tujuan menciptakan *wealth* (kekayaan) dengan cara menghasilkan nilai aset yang lebih bernilai tinggi. Dalam mengukur kenaikan kekayaan, perusahaan harus dapat menentukan *value* yang terdapat dalam asset-asetnya.

Intellectual capital umumnya diidentifikasi sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari *financial capital*nya. Hal ini berdasarkan suatu observasi bahwa sejak akhir 1980-an, nilai pasar dari bisnis kebanyakan dan secara khusus adalah bisnis yang berdasar pengetahuan telah menjadi lebih besar dari nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh akuntan (Roslender dan Fincham, 2004 dalam Iqbal, 2016).

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* adalah jumlah dari apa yang dihasilkan dari tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital* dan *customer capital*) yang

mana hal-hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang bisa memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan juga keunggulan bersaing yang mencakup pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, reputasi, dan juga kemampuan teknologi. Berikut tiga komponen bentuk *intellectual capital* (Sawarjuwono, 2003 dalam Takarini, 2014).

a. *Human Capital* (Modal Manusia)

Human capital merupakan *lifeblood* dalam modal intelektual. Disinilah sumber *innovation dan improvement*, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

b. *Structur Capital* atau *Organizational Capital* (Modal Organisasi)

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki

perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka modal intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

c. *Relational Capital* atau *Customer Capital* (modal pelanggan)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. *Relational capital* dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

Intellectual capital dihitung berdasarkan *value added* yang diciptakan oleh *physical capital/capital employed* (VACA), *human Capital* (VAHU), DAN *structural capital* (STVA). Gabungan ketiganya inilah yang disebut VAIC yang dikembangkan oleh Pulic (1999) yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki oleh perusahaan. (VAIC™) merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini *relative* mudah dan

sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi) (Iqbal, 2016)

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). VA dihitung sebagai selisih *output* dan *input*. *Output* (OUT) mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, sedangkan *input* (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan untuk memperoleh *revenue*. Hal ini yang terpenting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labor expanse*) tidak termasuk dalam IN. karena peran aktifnya dalam proses *value creation, intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labor expanse*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak termasuk dalam komponen IN. karena itu, aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*) (Iqbal, 2016).

VA dipengaruhi oleh efisiensi dari *Human capital* (HC) dan *structural capital* (SC). Hubungan lainnya dari VA adalah *capital employed* (CE), yang dalam hal ini dilabeli dengan VACA. VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *Physical capital*. Pulic (1998) dalam Iqbal (2016) mengasumsikan bahwa jika satu unit dari CE menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya.

Dengan demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagian dari *intellectual capital* perusahaan.

Hubungan selanjutnya adalah VA dan HC. *Value Added Human Capital* (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Pulic berargumen bahwa total *salary wage costs* adalah indikator dari HC perusahaan (Iqbal, 2016).

Hubungan ketiga adalah *structural capital coefisient* (STVA) yang menunjukkan kontribusi *structural capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan Rp. 1,- dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai, SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC, ia dependen terhadap *value creation* (Pulic, 1999).

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual perusahaan dengan menjumlah koefisien-koefisien yang telah dihitung sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut diformulasikan dalam indikator baru yang unik, yaitu VAIC™ (Ten Dkk, 2007). berikut perhitungan VAIC™ :

$$\mathbf{VAIC^{\text{TM}} = VACA + VAHU + STVA}$$

5. *Corporate Social Responsibility*

Hery (2013) dalam Gantino (2016) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Menurut Pearce dan Robinson yang dialih bahasakan oleh Kiroyan (2006) dalam Gantino (2016) mendefinisikan *corporate social responsibility* adalah konsep bahwa perusahaan harus melayani masyarakat sosial sebaik memberikan keuntungan *financial* kepada pemegang saham dan harus berkelanjutan secara terus menerus yang pada akhirnya para manajer akan menyadari bahwa keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis.

Sedangkan menurut Darwin (2004) dalam Kurnianto (2011) *corporate social responsibility* adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab sosial dibidang hukum. Istilah tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) mulai digunakan tahun 1970an meskipun beberapa aspek dalam tanggung jawab sosial telah ada sampai akhir abad 19, dan bahkan pada periode sebelumnya. (ISO FDIS 26000, 2010 dalam Ajilaksana, 2011).

CSR tidak lagi berpijak pada praktek *single bottom line* yang berorientasi pada kinerja keuangan saja, namun dewasa ini CSR juga telah

mengacu *pada triple bottom line*, yang artinya selain berorientasi pada kinerja keuangan perusahaan juga berorientasi pada aktivitas sosial dan lingkungan. Hal ini diyakini dapat menjamin keberlangsungan jalannya perusahaan. Namun praktek tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial rata-rata masih dilakukan secara sukarela dan bukan bersifat kewajiban. Praktek secara sukarela tersebut yang dalam konteks bisnis hanya untuk mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan para *stakeholder* yang meliputi pengurangan dampak buruk pada lingkungan, keselamatan dan kenyamanan tempat bekerja yang lihat dari sisi fisik dan psikologi khususnya hak dan kebebasan pekerja (Ajilaksana, 2011).

Dalam Pian KS (2010) dalam Ajilaksana (2011) disebutkan bahwa dalam memaknai CSR antar perusahaan pula, tergantung bagaimana perusahaan tersebut memaknai CSR. Disinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam partisipasinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaiknya disisi lain, masyarakat juga tidak dapat seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapan itu diluar batas aturan yang berlaku.

Terdapat 2 indikator yang dipakai perusahaan dalam melaporkan kegiatan CSR. Pertama yaitu indikator yang diterapkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI menyatakan pengungkapannya dalam 79 item

pengungkapan yang terdiri dari indikator ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), dan sosial yang mencakup tenaga kerja (14 item) hak asasi manusia (9 item) sosial (8 item) dan produk (9 item)

Kedua yaitu indikator yang dilakukan oleh Sembiring (2005) yang terdiri dari 78 item pengungkapan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM no VIII G.2 Berdasarkan tentang laporan tahunan dan kesesuaian item untuk diaplikasikan di Indonesia. Dimana dalam pengungkapannya terdiri dari indikator lingkungan (13 item), energi (7 item), kesehatan dan keselamatan kerja (8 item), tenaga kerja (29 item), produk (10 item), keterlibatan masyarakat (9 item) dan umum (2 item).

Penelitian ini menggunakan indikator CSR yang diterapkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Penelitian lain yang menggunakan indikator pengukuran CSR yang diterapkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) yaitu Agustien (2014) dalam Jumini (2017) konsep pelaporan CSR digagas dalam GRI (*Global Reporting Initiative*). Dalam GRI *Guidelines* disebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial pada bagian *standard disclosures*.

6. Good Corporate Governance

Good corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, yang mana memuat peraturan dan prosedur

yang harus dilaksanakan dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan perusahaan, merumuskan mekanisme peneapan-penetapan keputusan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai keobjektifitas serta pemantauan kerja (Daniri, 2005 dalam Takarini, 2014).

Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI, 2001) dalam Rustiarini (2010) menjelaskan bahwa *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para *stakeholders* yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menghasilkan suatu nilai tambah (*value added*) bagi pihak yang berkepentingan.

Mulyati (2011) menyatakan *Good Corporate Governance* (GCG) muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atausering kali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal (*prinsipal*) dengan manajer (*agent*) adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak mendatangkan return. GCG diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik, yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja keuangan perusahaan.

Definisi lain yang diungkapkan oleh Arifin (2005) dalam Mulyati (2011) menjelaskan bahwa *good corporate governance* merupakan upaya

yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Indikator GCG dapat diproksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kepemilikan institusional (Maryanto, 2017). Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit (Mulyati, 2011).

a. Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya (Mulyati, 2011)

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) dalam Sabrina (2010), struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan pendekatan ketidaksamaan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Sabrina (2010) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanismen GCG yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien dkk, 2006 dalam Sabrina, 2010). Menurut Wening (2009), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan

yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Bathala dkk, (1994) dalam Sabrina, (2010) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen didefinisikan sebagai proporsi pemegang saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi dewan komisaris dan direksi (Diyah dan Erman, 2009 dalam Ningrum, 2012). Menurut Budiono (2005) dalam Mulyati (2011), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dkk, 2007 dalam Sabrina, 2010).

Ross dkk, (1999) dalam Mulyati (2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang

saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

c. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif serta menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya (Sulistyowati, 2017).

Perusahaan yang sudah melakukan *good corporate governance* diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris independen. Karena dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 20% dari keanggotaan dewan komisaris. Dewan

komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Tumbuan, 2005 dalam Sekaredi, 2011).

d. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan fungsi dan tugasnya. Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Sulistyowati, 2017).

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal (Sekaredi, 2011)

Keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya satu orang, anggota komite ini yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen (Sekaredi, 2011).

7. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja yang dilakukan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Kinerja yang dilakukan perusahaan dalam mengelola uangnya harus secara prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dalam mengelola uangnya perusahaan tidak sembarang orang lain bisa menangani keuangan perusahaan, harus dengan orang yang telah dipercaya oleh perusahaan agar dalam melakukan kerjanya lebih baik dan juga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dan benar. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan (Restavia, 2013). Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggung jawaban (Restavia, 2013).

Menurut Elanvita (2008) dalam Ningrum (2012) menyatakan bahwa prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya sebagai satu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Memon, dkk (2012) dalam Iqbal (2016) menyatakan kinerja adalah kualitas dari setiap perusahaan yang dapat dicapai dengan hasil yang membanggakan. Perusahaan harus terus melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kinerja perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan. Kinerja keuangan dikatakan bagus jika

hasil kerja dari seorang atau organisasi dalam perusahaan sudah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan, tercapainya tujuan dari organisasi baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek dan laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan prestasi kerja (Safitri, 2011).

Untuk menilai kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan tahunan yang disusun oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan tahunan perusahaan akan memberikan informasi dan gambaran tentang kinerja perusahaan yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada *stakeholder*. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, karena analisis ini dapat menjelaskan secara rinci tentang kinerja yang telah dicapai perusahaan serta keadaan tentang kondisi keuangan perusahaan. Rasio merupakan suatu bentuk rumusan matematis yang menunjukkan hubungan antara angka-angka tertentu. Dalam analisis rasio keuangan angka-angka yang dianalisis berasal dari data keuangan. Agar rasio-rasio itu mempunyai arti, maka rasio yang dihitung harus dari variabel-variabel yang mampu memberikan arti (Noviyanti, 2010). Jadi, analisis rasio mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk menilai suatu kondisi keuangan dan dapat dipakai sebagai dasar perbandingan dari waktu ke waktu (Iqbal, 2012).

Iqbal (2012) mengatakan salah satu dari analisis rasio keuangan adalah rasio modal saham. Menurut Gill (2003) dalam Novianti (2010)

rasio modal saham atau disebut juga dengan rasio pasar merupakan perhitungan keuangan yang digunakan oleh para investor untuk mengevaluasi kinerja *go public*.

Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas perusahaan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dalam setiap ekuitas yang didanakan. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola dana atau modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. ROE yang semakin mampu memberikan return bagi pemegang saham. Dua hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan ROE adalah ekuitas dan *net profit* (Iiembono, 2014).

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Andriana (2014)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011)	- <i>Intellectual capital</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2.	Ariantini, Sujana dan Yuniarta (2017)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)	- <i>Intellectual capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). - <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE). - <i>Good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE).

Lanjutan Tabel 2.1

3.	Gantino (2016)	Pengaruh <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>return on equity</i> (ROE). - <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>return on asset</i> (ROA).
4.	Prasojo (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan <i>good corporae governance</i> berpengaruh signifikan terhadap CAR, ROA, ROE, BOPO, dan FDR.
5.	Maryanto (2017)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intellectual capital</i> terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas.
6.	Iqbal (2016)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intellectual capital</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. - <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
7.	Sulistiyowati (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan dengan konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan persepsi keterkaitan

antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini menguji tentang pengaruh *intellectual capital*, *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini didasarkan pada *resource based theory*, teori *stakeholder*, dan teori keagenan, dimana teori ini lebih menitik beratkan pada posisi para *stakeholder* yang dipandang lebih memiliki pengaruh. Kelompok inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi suatu perusahaan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan. kelompok-kelompok *stakeholder* disini bukan hanya mencakup pelaku usaha dan pemegang saham perusahaan, tetapi para pekerja/buruh/karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan (Iqbal, 2016)

Satu kesepakatan umum dalam teori *stakeholder* dimana laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham (*shareholder*), sementara *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan *stakeholder* dan kemudian disalurkan kepada *stakeholder* yang sama (Ghozali dan Chariri, 2008 dalam Iqbal, 2016). Value added yang dipandang mempunyai ketepatan yang lebih tinggi dihubungkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*.

Dengan analisis kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan variabel bebas yaitu *Intellectual Capital*, *Corporate Social*

Responsibility dan *Good Corporate Governance* dengan variabel terikat yaitu kinerja keuangan.

1. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan

Melihat sudut pandang dari *resource-based theory* yang dipelopori oleh Penrose (1959), mengemukakan bahwa sumberdaya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumberdaya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Jika perusahaan mampu mengelola sumberdaya secara baik maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan dan kompetensi tinggi merupakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik, maka hal ini akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, maka kinerja perusahaan pun meningkat. Sebagian besar dari hasil penelitian, seperti misalnya Ulum (2008), Badingatus (2010), dan Faizal (2013) menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat akan muncul image dalam masyarakat bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian dalam mengelola produk yang dihasilkannya. Hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan akan kualitas produk

yang dihasilkan dan akhirnya pada loyalitas untuk menggunakan produk tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan (Santoso, 2008 dalam Daud dan Amri, 2008). *Corporate social responsibility* mengakibatkan pasar akan memberikan apresiasi positif yang dapat berdampak kepada peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. (Husnan dan Pamuji, 2013).

Hasil penelitian Nurhudha (2014) membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya *corporate social responsibility* meningkat dan akan diikuti oleh meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Wening (2009), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan

meningkat. Penelitian terdahulu dari Midiastuty dan Mahfoedz (2003) dalam Andreawan (2013) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah agen yang kedua. Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Manajer yang merangkap sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang ditetapkan pada perusahaan yang dikelola. Hasil penelitian Mulyati (2011) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Pengaruh Komisi Independen terhadap Kinerja Keuangan

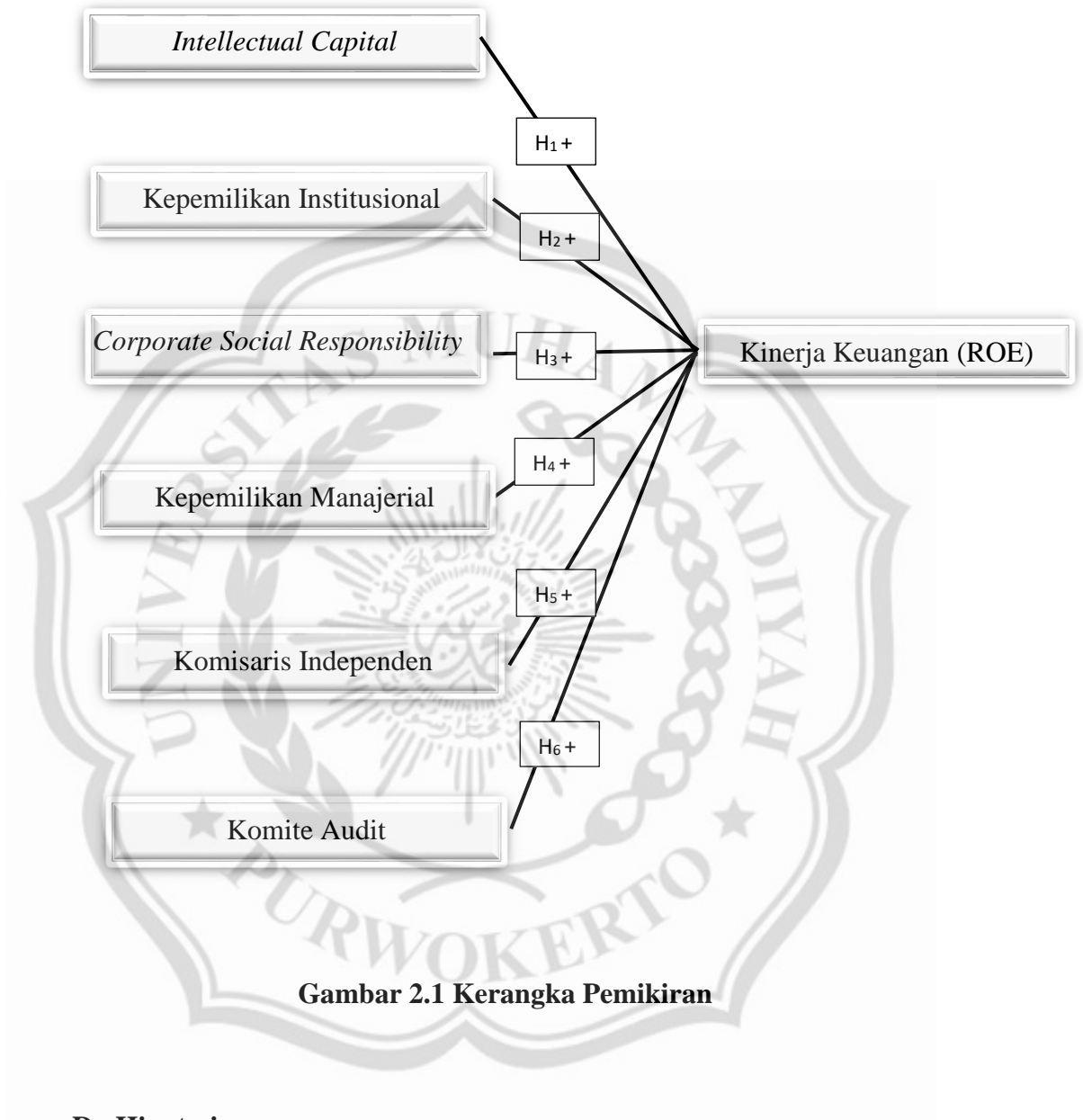
Menurut Pramuka (2007) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komposisi komisaris independen yang semakin

besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bersikap objektif dan mampu melindungi kepentingan *stakeholder* perusahaan. Hasil penelitian Sulistyowati (2017) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan.

6. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Sam'ani (2008) mengatakan dalam penelitiannya bahwa komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir. Hasil penelitian Mulyawati (2011) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Model yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *resource-based theory*, *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang memberikan

suatu keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para kompetitornya, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan dengan adanya penggunaan *intellectual capital* secara baik dan benar, maka dapat diperoleh sebagaimana cara menggunakan sumber daya lain yang dimiliki perusahaan secara efisien dan ekonomis. Penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis dapat memperkecil biaya-biaya yang terjadi. Semakin tinggi *intellectual capital* (VAIC) maka laba semakin meningkat (Simarmata, 2015).

Dalam pemaparan diatas *intellectual capital* diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan profitabilitas perusahaan. Penelitian Iqbal (2016) dan Maryanto (2017) membuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan

Corporate social responsibility merupakan wujud aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan

berkelanjutan. Dan pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki dampak jangka panjang pada perusahaan (Iqbal 2016).

Jadi makin baik perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka investor mengetahui bahwa ke depan kondisi perusahaan akan menjadi lebih baik berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan bersedia menambah investasinya sehingga membuat nilai pasar perusahaan menjadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Penelitian Gantino (2016) membuktikan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *return on equity* (ROE). Sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa semua terlibat dalam pengungkapan kinerja perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang digunakan adalah:

H₂: *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Adreawan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka akan memperkuat motivasi manajemendalam bekerja sehingga meningkatkan nilai saham perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian terdahulu dari Midiastuty dan Mahfoedz (2003) dalam Adreawan (2013) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Putri (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Hasil penelitian Mulyawati (2011) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi

terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (Sulistyowati, 2017).

Menurut Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Komposisi komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bersikap objektif dan mampu melindungi kepentingan stakeholder perusahaan. Hasil penelitian Sulistyowati (2017) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

6. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit adalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen (Sulistiyowati, 2017)

Sam'ani (2008) mengatakan dalam penelitiannya bahwa komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisir.

Hasil penelitian Mulyawati (2011) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis selanjutnya adalah:

H₇: komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan